
KEARIFAN LOKAL DALAM PENCITRAAN INSTITUSI PEMERINTAH SEBAGAI LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK

Tia Muthiah Umar

Abstrak

Memudarnya pemahaman dan penerapan kearifan lokal yang hampir merata di segala kalangan anak bangsa ini, telah memicu keprihatinan yang mendalam. Memudarnya pemahaman ini bukan saja pada level individual, tetapi juga pada level lembaga. Sementara kita mengetahui bahwa sejarah bangsa ini dibentuk dari kearifan lokal yang diajarkan oleh para pendahulu.

Berbagai penelitian telah menunjukkan betapa lembaga pemerintah sedemikian bobroknya. Kesewenang-wenangan dalam pelayanan publik, sampai kesewenangan dalam eksploitasi asset lembaga yang bukan haknya telah menjadi wajah yang biasa dalam percaturan sosial.

Institusi pemerintah merupakan aparat yang dibangun dalam rangka fungsi pelayanan publik. Sebagai institusi pemberi jasa layanan pada masyarakat, tentunya harus mengedepankan prinsip-prinsip pelayan publik.

Citra lembaga yang memburuk merupakan akumulasi dari nilai-nilai yang terdegradasi dalam kurun waktu yang cukup lama. Saat ini menjadi amat penting untuk segera bergerak memperbaiki keadaan dengan merevitalisasi dan mentransformasi kearifan lokal di lembaga-lembaga Pemerintah.

Paparan ini ingin menjelaskan mengenai berbagai hal tentang: keniscayaan citra bagi institusi, pentingnya menerapkan kearifan lokal bagi pelayanan publik yang prima, dan strategi pembangunan citra lembaga berdasar kearifan lokal.

Kata kunci: Kearifan lokal, Citra Institusi, Pelayanan Publik.

1. PENDAHULUAN

Institusi pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan yang karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan

meningkatkan taraf kehidupan kebahagiaan kesejahteraan masyarakat.

Institusi pemerintah sebagai bagian dari perangkat untuk melayani warga negara, masih belum dapat menunjukkan eksistensi dalam fungsi yang semestinya. Berbagai harapan yang disandarkan pada mereka seringkali “jauh panggang dari api”.

Kekecewaan dari para pengguna jasa tidak banyak menjadi pertimbangan perbaikan pelayanan. Dan pengguna jasa masih merupakan sekumpulan manusia yang tidak punya daya tawar, sehingga satu waktu, karena kebutuhan, maka kembali harus berhadapan dengan kekecewaan yang sama.

Tetapi seiring waktu dunia menjadi sistem global yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara, terutama yang telah melakukan ratifikasi atas produk globalisasi semisal pasar bebas asia tenggara, pasar bebas asia, atau pasar bebas dunia.

Indonesia telah menjadi bagian dari negara yang melakukan ratifikasi itu, sehingga pemerintah dan rakyat harus siap menghadapi konsekuensinya. Bagi pemerintah tuntutan untuk dapat lebih memberikan pelayanan, sedangkan bagi rakyat boleh menuntut lebih keras atas pelayanan yang prima.

Ada opini umum yang menyatakan bahwa prinsip kerja globalisasi amat bertentangan dengan prinsip kearifan lokal yang telah hidup lama di tengah-tengah kehidupan manusia.

Dalam pandangan penulis, kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia memang memunculkan spirit yang berbeda-beda. Dalam entitas tertentu, spirit kearifan lokal yang muncul bisa jadi amat berdayajuang tinggi, mendorong para penganutnya untuk bermental baja dalam menghadapi kehidupan, dan disisi lain, ada entitas yang memiliki kearifan lokal yang meninabobokan pengikutnya. Spirit yang kedua inilah yang tidak akan sejalan dengan prinsip globalisasi. Tetapi prinsip kelompok yang pertama, amat dapat mengikuti perkembangan globalisasi.

Sebut saja kearifan lokal masyarakat minang, yang mendorong sebanyak-banyak generasi muda untuk merantau, justru amat sesuai dengan semangat globalisasi. Sebaliknya, masyarakat jawa yang menganggap hujan batu di negeri sendiri lebih baik, ketimbang hujan emas di negeri orang, ini yang kontraproduktif dengan globalisasi.

Di kalangan masyarakat sunda dan masyarakat jawa ada peribahasa yang semakna yakni *bongkok ngaronyok, bengkung ngariung; mangan ora mangan sing penting ngumpul*). Maknanya, apapun yang terjadi, terjadilah yang penting adalah selalu bersama. Contoh lain kearifan lokal yang tidak sesuai dengan semangat globalisasi adalah peribahasa alon alon waton kelakon, biar lambat asal selamat, biar lambat daripada tidak sama sekali; karena globalisasi menuntut setiap orang yang ingin mendapat tempat untuk berfikir dan berlaku cepat, tepat dan akurat.

Peribahasa hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas dinegeri orang, bila batunya batu mulia (dan ini amat melimpah) di Indonesia, alangkah lebih baiknya anak bangsa dapat mengembangkan apa yang sudah tersedia dan menjadikannya lebih maju, ketimbang harus berangkat ke negara lain, yang sumber kehidupannya tidak lebih baik. Dengan kata lain, menjadi tuan rumah di negara sendiri tentu saja amat mulia, tidak dapat dibandingkan dengan bila menjadi budak di negara orang.

Bila dikumpulkan, tentu masih banyak lagi produk budaya lisan yang bermakna tidak produktif, hal seperti itulah yang harus di tafsir ulang. Sehingga menjadi penting untuk melakukan reinterpretasi terhadap suatu kearifan lokal yang telah lama ada dan mengakar. Reinterpretasi ini tentu akan menuntut perubahan mendasar dari sikap dan perilaku hidup masyarakat dalam implementasi kearifan lokal.

Dengan kondisi zaman yang telah mengglobal seperti sekarang ini, Kesepakatan pasar bebas ini telah memunculkan persaingan bebas dalam segala bidang. Maka boleh jadi hukum

seleksi alam – yang menyatakan siapa yang kuat dialah yang akan dapat *survive*-- menjadi akan relevan.

Setiap orang atau lembaga bersaing untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, karena sumber daya yang memang terbatas. Maka dalam hal institusi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik, perlu menyadari bahwa pelayanan kepada publik tidak akan lagi menjadi monopoli pemerintah, sehingga pengguna layanan dapat segera memutuskan untuk tidak menggunakan jasa layanan pemerintah bila memang tidak memuaskan.

2. PEMBAHASAN

2.1 Masalah Pelayanan Institusi Pemerintah Saat ini

Berita di berbagai media massa tentang kondisi bangsa Indonesia masih terus berkebutakan di sekitar korupsi. Semakin banyak kasus korupsi terungkap, semakin meyakinkan bahwa jumlah korupsi yang sesungguhnya akan jauh sangat besar. *Governance Indicator World Bank* menilai dalam dasa warsa terakhir ini, pengawasan terhadap korupsi di Indonesia tidak mengalami kemajuan yang berarti. Dalam penilaian awam, warga biasa, para ahli maupun LSM, sepakat bahwa korupsi tambah berkembang subur menggurita. Hanya karena kurang sikap peduli, maka masyarakat membiarkan saja selama korupsi itu dianggap tidak secara langsung mengganggu kehidupannya.

Praktek-praktek korup terjadi dimana-mana. Mulai dari kantor kelurahan sampai kantor kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Kantor-kantor itu sejatinya bertugas untuk memberikan layanan kepada publik, dalam hal ini siapa saja yang memerlukan pelayanan, baik warga negara maupun bukan warga negara. Bila masih belum jelas apa pelayanan publik dan bagaimana fakta pelayanan publik di Indonesia, maka berikut ini penjelasan yang sederhana dari sebuah Artikel on-line bertajuk Pelayanan Publik Tanah Air Mengecewakan:

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Buruknya pelayanan publik memang bukan hal baru, fakta di lapangan masih banyak menunjukkan hal ini. Kita semua pasti pernah menemukan tiga masalah penting yang banyak terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu pertama, besarnya diskriminasi pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan masih amat dipengaruhi oleh hubungan per-konco-an, kesamaan afiliasi politik, etnis, dan agama. Fenomena semacam ini tetap marak walaupun telah diberlakukan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN yang secara tegas menyatakan keharusan adanya kesamaan pelayanan, bukannya diskriminasi. Kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab munculnya KKN, sebab para pengguna jasa cenderung memilih menyogok dengan biaya tinggi kepada penyelenggara pelayanan untuk mendapatkan kepastian dan kualitas pelayanan. Dan ketiga, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ini merupakan konsekuensi logis dari adanya diskriminasi pelayanan dan ketidakpastian tadi. (kompasiana, 29 Juni 2012)

Menurut Lembaga Survei Indonesia, buruknya demokrasi di Indonesia sangat terkait dengan buruknya tata kelola pemerintah dalam penegakan hukum dan pengawasan korupsi.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa buruknya tata kelola adalah implikasi dari buruknya karakter manusia-manusia yang berada dalam lembaga pemerintah. Sedemikian sulit untuk dapat menegakkan hukum di Indonesia, dan demikian longgarnya

pengawasan pada perilaku-perilaku korup menjadikan citra demokrasi di Indonesia buruk dimata dunia.

Persoalan perilaku-perilaku korup telah mengakumulasi menjadikan buruknya perilaku pelayanan aparat di lembaga-lembaga pemerintah. Ketiadaan standar operasional prosedur (menyangkut waktu dan biaya pelayanan) di setiap lembaga pemerintah memungkinkan semakin suburnya penyimpangan.

Sebagai contoh yang amat umum misalnya bagaimana pelayanan di kantor layanan publik. Pada saat akan mengurus surat-surat yang diperlukan dalam melengkapi administrasi kewarga negaraan, mulai dari tingkat RT sampai tingkat nasional, sejak lini depan pelayanan sampai pengambilan dokumen, ketidaknyamanan sangat terasa. Disinilah mulai setiap orang dengan inisiatifnya menciptakan kenyamanan dan kemudahan dengan caranya masing-masing, dan cara yang termudah –walau tidak murah—adalah menggunakan uang sebagai alat mempermudah urusan. Padahal UU dengan jelas memerintahkan negara menyelenggarakan pelayanan kepada publik dengan mengindahkan beberapa azas, diantaranya adalah profesionalitas dan akuntabilitas.

Mochtar Lubis telah menengarai hal ini dan dalam Pidato Kebudayaan yang disampaikan di Taman Ismail Marzuki tahun 1977, disampaikan bahwa watak, tabiat, citra manusia Indonesia sebagai anggota masyarakat yang muncul akhir-akhir ini merupakan pengaruh masa penjajahan, yang teramat berat menekan ketahanan spiritual manusia Indonesia.

Katakanlah selama masa penjajahan Belanda, 350 tahun dan juga masa 3,5 tahun pendudukan oleh Jepang, mentalitas bangsa Indonesia dijatuhkan sampai ke titik nadir, titik kehinaan manusia yang dilakukan secara sistematis oleh kolonialisme. Kolonialisme sukses mengkooptasi pikiran rakyat Indonesia bahwa mereka adalah manusia-manusia rendah. Adalah minoritas masyarakat yang tetap dapat mempertahankan martabatnya, karena dukungan pemahaman akan falsafah kemanusiaan dan tentu saja pemahaman akan agama yang dianutnya.

Hingga akhirnya manusia Indonesia secara umum tidak mempunyai kepercayaan kepada harkat martabatnya sendiri, bahkan secara tidak sadar melestarikan sikap itu kepada generasi penerusnya.

Dari pengamatan Mochtar Lubis itu penulis menyimpulkan bahwa akibat terjajah, maka muncul mentalitas manusia Indonesia yang tidak percaya diri, suka melepaskan tanggungjawab, lemah mental, suka menerabas untuk mendapatkan keinginannya, tidak suka ikut dalam persaingan, tidak mau mengikuti prosedur umum, melakukan aktivitas secara serampangan, memandang aneh kepada manusia yang suka menunjukkan prestasinya.

Maka ketika manusia-manusia berwatak demikian yang menjadi pelaksana-pelaksana di Institusi Pemerintah, akibatnya adalah perilaku dan produk pelayanan seperti apa yang sampai saat ini masih sering kita dengar dan kita rasakan, tidak memuaskan!

2.2 Pentingnya Citra Bagi Sebuah Lembaga

Citra bisa disejajarkan dengan nama baik, adalah suatu keadaan seseorang atau suatu lembaga yang karena upaya kerasnya menghimpun berbagai karakter baik menjadi bagian kepribadiannya. Memiliki citra adalah suatu keniscayaan. Manusia dapat “menjual” dirinya dihadapan publik apabila publik mengetahui berbagai keunggulan karakteristik yang melekat dalam dirinya.

Dalam era yang serba kompetitif, ketika semua harus didapatkan melalui seleksi yang ketat, maka citra akan menjadi salah satu modal penting untuk menjadi pemenang. Demikian pula ketika suatu lembaga menginginkan keberadaannya menjadi tujuan pilihan publik, maka tidak ada pilihan, kecuali terus membangun lembaga yang unggul. Maka sistem seleksi alam akan berjalan dengan sendirinya, dan kemenangan akan berpihak kepada keunggulan.

Citra terbentuk sebagai akumulasi dari terbuktikannya janji-janji yang ditawarkan oleh lembaga kepada masyarakat pengguna. Janji-janji yang terbukti itu akan menjadi jalan pembuka bagi keberterimaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik itu.

Melekatnya karakter positif pada pelaksana institusi akan membawa institusi tersebut kepada pencitraan yang positif. Sekalipun masih sering diperdebatkan, apakah manusia yang memberikan nilai/citra kepada institusi atau sebaliknya apakah institusi yang memberikan nilai/citra kepada manusia, kenyataannya, institusi digerakkan oleh manusia-manusia secara aktual, terlepas apakah peraturan tertulis di institusi itu dilaksanakan atau bahkan dilanggar sama sekali.

Adapula pemahaman bahwa lembaga sebagai system telah memiliki normanya sendiri, sehingga apapun karakter manusia yang masuk kedalam system itu secara langsung akan mengikuti norma yang telah ada. Untuk pendapat ini Habermas menolaknya. Kritiknya terhadap teori system adalah kepada sifatnya yang terlalu objektivistis, yakni menghapus kesadaran subyek dan menekankan *status quo* social (Hardiman, 1993:143)

Hal ini menguatkan keyakinan bahwa perlunya karakter yang positif pada setiap penggerak lembaga, karena sesungguhnya secara konstitusional lembaga memang dihadirkan dengan norma-norma yang positif. Ini berarti tidak ada keraguan bahwa institusi pemerintah seperti dikemukakan terdahulu mempunyai fungsi pelayanan dan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.

Karena itu tidak mengherankan bila di negara-negara maju, pembentukan karakter telah menjadi suatu perhatian yang luar biasa dari negara bahkan dari para ilmunya. Penelitian-penelitian yang sungguh-sungguh dari negara maju telah menghasilkan beberapa konsep yang menjadi rujukan bagi banyak orang dan lembaga terkemuka di berbagai belahan dunia, termasuk bagi penggiat sosial dan ilmuwan Indonesia.

Sebuah lembaga penelitian di California Selatan, bernama Josephson Institute berdiri sejak 1987, dalam situsnya memperkenalkan bahwa mereka berfokus dibidang sosial yang bermaksud mengarahkan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang membuat kehidupan menjadi lebih jujur, adil, peduli, dan akuntabel. Mereka memperkenalkan *The Six Pillars of Character* sbb:

1. *Trustworthiness*, kejujuran. Jujurlah – Jangan menipu, curang, mencuri – Dapat diandalkan, lakukan apa yang anda katakan dan akan dilakukan – Beranilah untuk melakukan hal yang benar – Bangun nama baik - Setialah, tetaplah bersama keluarga, teman dan negara.
2. *Respect*, menghormati, perlakukan orang lain dengan hormat; mengikuti *Golden Rule* • Jadilah toleran dan menerima perbedaan • Gunakan sopan santun, bukan bahasa yang buruk • menimbang rasa orang lain • Jangan mengancam, memukul atau menyakiti siapa pun • berdamailah dengan kemarahan, penghinaan, dan perselisihan
3. *Responsibility*, tanggungjawab. Lakukan apa yang harus anda lakukan • Rencana ke depan • Bertekunlah: terus berusaha! • Selalu lakukan yang terbaik • Gunakan kontrol diri • Jadilah disiplin • Berpikirlah sebelum bertindak - mempertimbangkan konsekuensi • Bertanggung jawab untuk kata-kata, tindakan, dan sikap • Berilah contoh yang baik bagi orang lain
4. *Fairness*, keadilan. Bermain sesuai aturan • menerima dan berbagi • berpikiran terbuka, mendengarkan orang lain • Jangan mengambil keuntungan dari orang lain • Jangan asal menyalahkan orang lain • Perlakukan semua orang secara adil
5. *Caring*, peduli. Bersikap baiklah • Jadilah penuh kasih dan tunjukkan Anda peduli • Bersyukurlah • Maafkan orang lain • Membantu orang yang membutuhkan
6. *Citizenship*, kewarganegaraan. lakukan tugas anda untuk membuat sekolah dan masyarakat yang lebih baik • Bekerja sama • Terlibat dalam urusan sosial • Tetap terinformasi; bersuaralah • Jadilah tetangga yang baik • Taatilah hukum dan aturan • Hormati otoritas • Lindungi lingkungan • Relawan

Mari kita perhatikan konsep tersebut, dan kita bisa merasakan sebagai sesuatu yang baru sama sekali. Seringkali kita

terpesona dengan berbagai konsep nilai mutakhir yang diperkenalkan para sarjana barat tentang tata hidup baru manusia modern yang harus dibangun untuk masa depan manusia yang berperadaban. Seakan-akan peradaban hanya dimiliki oleh negara-negara maju saja.

Atau perhatikan rumusan berikut yang dibuat oleh Jennifer Aaker, dalam situs www.valuebasedmanagement.net bulan juli 2012, yang menggambarkan *brand personality dimensions*, yang merupakan *framework* yang menjelaskan dan mengukur “citra kepribadian” dalam 5 core yakni:

1. *Sincerity (down to earth, honest, wholesome, cheerfull)*
2. *Excitement (daring, spirited, imaginative, up to date)*
3. *Competence (reliable, intellegent, successful)*
4. *Sophistication (upper class, charming)*
5. *Ruggedness (outdoorsy, tough)*

Sederhananya, Jennifer Aaker menyatakan bahwa dalam rangka membentuk Citra Kepribadian manusia yang ideal maka dituntut untuk memiliki sifat-sifat tulus, rendah hati, jujur, sehat, ceria, penuh semangat, berani, imajinatif, mutakhir, kompeten, handal, cerdas, sukses, canggih, berkelas, menawan, kuat dan tangguh.

Nilai-nilai yang diperkenalkan oleh para peneliti barat itu, dianggap penting untuk dihadirkan, diinternalisasikan dalam diri manusia yang menginginkan keberadaban di dalam kehidupannya. Sekali lagi, seringkali kita merasa ini adalah sesuatu yang baru tetapi juga mungkin merasa mengenal konsep ini jauh sebelumnya, *de javu*.

Mari perhatikan sekumpulan “konsep” dibawah ini, yang tidak lain merupakan kearifan lokal jawa barat yang sudah dikenal sejak masa nenek moyang, yang dimaksudkan sebagai pengajaran bagi keturunannya untuk memegang teguh 5 nilai hidup:

1. *Cageur* (sehat rohani, sehat jasmani dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan Allah SWT dan Lingkungan)
2. *Bageur* (baik, ramah, penolong, dermawan)

3. *Bener* (jujur, lurus)
4. *Pinter* (cerdas, intelektual, pandai)
5. *Singer* (terampil, ahli, profesional)

Atau pepatah *silih asah, silih asih, silih asuh*, yang maknanya adalah bagaimana setiap manusia harus saling memperhatikan dan mengasah potensi, hati, intelektual; manusia harus saling mengasih, menghormati; manusia harus saling menjaga, dilarang saling mencurangi,

2.3 Kearifan lokal bagi pelayanan publik yang prima

Perlu usaha yang sungguh-sungguh bagi semua yang peduli dengan kelangsungan bangsa ini, untuk melakukan revitalisasi institusi pemerintah sehingga institusi pemerintah akan selalu menjadi “tuan” di rumahnya sendiri.

Sejak awal bangsa ini lahir, para pendahulu, para leluhur telah meletakkan dasar-dasar filosofi yang sangat strategis bagi Bergeraknya masyarakat diatas landasan kearifan. Perlu spirit yang kuat untuk para pelanjut bangsa ini melakukan penggalian kembali nilai-nilai kearifan, yang terbukti demikian adiluhur.

Masyarakat awam pun memahami bahwa kearifan lokal itu dapat dirasakan pada banyak hal terutama dalam materi komunikasi sosial, bahkan produk komunikasi sosial yang ditanamkan secara sadar oleh para pendahulu dan kemudian disepakati oleh para anggota masyarakat untuk dipelihara dan diteruskan.

Seringkali kita disadarkan bahwa banyak hal disekitar kita sesungguhnya masih menjaga dan melaksanakan kearifan lokal. Antara sulit dan mudah untuk dapat menangkap gejala kearifan lokal ini, tetapi yang jelas diperlukan kesadaran yang tinggi, didukung oleh ketelitian dan daya nalar yang tajam.

Bila sebagian orang yang frustrasi menganggap sulit dan rumitnya menangkap realitas kearifan lokal di tengah masyarakat ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami, sebenarnya nurani manusia dapat dengan mudah menuntun untuk mengenali gejalanya.

Bahasa sebagai media interaksi amat mewakili jika dijadikan sebagai alat analisis dari berbagai peribahasa, petuah, lambang komunikasi, dan produk sosial yang mengandung kearifan lokal. Bahasa mampu mendeskripsikan kearifan lokal dengan sempurna sekalipun dalam bentuk yang amat sederhana. Sekalipun Ignatius Bambang Sugiharto berpendapat bahwa keterbatasan penggunaan deskriptif bahasa, tetapi menjadi memungkinkan ketika bahasa ditinjau dari sudut lain yakni fungsi transformatif bahasa. (Sugiharto, 1996:83).

Dalam falsafah bangsa Indonesia "*Bhineka tunggal ika*" yakni satu bangsa dengan budaya yang amat beragam, sesungguhnya tidaklah sulit menemukan berbagai kearifan lokal yang hidup dan melandasi perjalanan hidup masyarakatnya. Kearifan lokal dapat ditemui dalam berbagai produk budaya melalui pesan-pesan yang terkandung dalam peribahasa, nyanyian, pepatah, petuah, ataupun semboyan kuno yang sehari-hari begitu dekat dengan kehidupan masyarakat.

Kearifan lokal dalam istilah lain dapat disejajarkan dengan *civilization* atau peradaban, menjadi bagian tak terpisahkan dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama, hingga dapat diamati melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Kearifan lokal tadi, jika didayagunakan dengan tepat dengan dukungan ilmu dan teknologi, diyakini akan mampu mendorong masyarakat ke arah kemajuan yang dicita-citakan oleh setiap bangsa, yakni menjadi masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat yang berkeadaban, masyarakat yang mulia.

2.4 Strategi Pembangunan Citra Lembaga berdasar Kearifan Lokal

Bagaimana cara yang tepat untuk dapat menjadikan kearifan lokal sebagai landasan spiritual bagi bertumbuhnya sebuah lembaga yang memiliki keunggulan? Diperlukan kesadaran untuk membuat sebuah perubahan besar dalam tata kehidupan sosial lembaga, dari yang buruk kepada keadaan yang baik.

Adalah pernyataan yang benar bahwa kearifan lokal di suatu daerah boleh jadi berbeda dengan kearifan lokal di daerah lain. Manfaat keberbedaan ini tentu saja harus menjadi sebuah peluang bagi siapa saja untuk dapat belajar dari yang lebih baik. Pendiri negara Singapura Lee Kuan Yew, menyatakan bahwa uang tidak dapat membeli perilaku yang sopan. Sangat penting bagi kita untuk mau memahami budaya bangsa lain yang baik yang telah menyebabkan negaranya dikategorikan sebagai negara maju. Dengan menjaga dan memelihara kearifan lokal tentu saja diharapkan muncul kemajuan bagi lembaga, penilaian positif dari siapapun, dan tentu saja penghargaan yang akan diberikan kepada lembaga sebagai yang unggul.

Sebelum sibuk mencari dan menggunakan kearifan lokal dari luar, tentu sebaiknya gali kembali dan kampanyekan secara terus menerus kekayaan dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Leluhur kita amat mengetahui nilai apa yang baik dan bila diterapkan dalam kehidupan anak cucunya, maka keunggulan akan menjadi bagian kehidupan.

Sesungguhnya perilaku korup saat ini, sangat jauh dari kearifan lokal bangsa. Masyarakat tidak pernah diajarkan untuk curang, karena “sekali lancung ke ujian, maka seumur hidup orang tidak akan percaya”. Perbuatan manusia tidak boleh menyimpang dari perkataan karena “mulutmu harimaumu”. Hendaknya semua bekerja keras, karena tidak ada kesuksesan bila tidak ada kerjakeras “bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”. Pepatah-pepatah ini perlu menjadi pegangan dan menjadi karakter bagi setiap orang, bahkan penting untuk menjadi pedoman bagi setiap lembaga pelayanan publik.

Dalam pandangan sosiolog Arief Budiman, untuk menjadikan suatu bangsa terus menerus melangsungkan pembangunan, maka yang diperlukan adalah manusia-manusia yang berkarakter kreatif, karena dengan kreativitas akan dapat dipecahkan masalah-masalah kehidupan.

3. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Institusi Pemerintah yang sejak awal bertugas melakukan kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dibangun berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan tugas mulianya itu, sejatinya institusi pemerintah juga memuliakan eksistensinya dengan menampilkan citra pelayanan yang prima kepada masyarakat berdasarkan kearifan lokal yang sudah teruji keandalannya.

Seiring perubahan zaman, pemerintah perlu menyadari bahwa pelayanan kepada publik tidak akan lagi menjadi monopoli pemerintah. Ini telah menjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian pasar bebas. Dengan kesepakatan itu akan memungkinkan pengguna layanan dapat segera memutuskan untuk tidak menggunakan jasa layanan pemerintah bila memang tidak memuaskan.

Pemerintah hendaknya menjadikan setiap keadaan sebagai tantangan yang memotivasi untuk menjadi lebih baik, karena kehilangan peluang berarti kehilangan fungsi pemerintah sebagai penjamin kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam kenyataannya, Institusi pemerintah sebagai wadah akan menampilkan citranya berdasarkan karakter-karakter manusia yang menggerakkan institusi itu. Karena itu memilih aparat yang berkarakter adalah suatu prasyarat bagi pelayanan prima institusi pemerintah. Karakter-karakter manusia yang terbangun atas kekayaan kearifan lokal yang luar biasa besarnya, yang sejak dulu telah menjadi panduan bagi kebesaran bangsa, yang karena kelengahan dan faktor imperialisme telah tergerus dan terabaikan oleh anak-anak bangsa.

Berbagai kearifan lokal yang ada, disamping ada yang melemahkan, tetapi nyata-nyata banyak yang juga memiliki daya dorong yang tinggi untuk membentuk karakter-karakter adiluhur.

Tetapi karena keadaan, hal tersebut perlu direvitalisasi secara massal dan berkelanjutan dengan komitmen yang kuat antara pemerintah sebagai pimpinan bangsa dan seluruh anak bangsa.

Akan tetapi atas berbagai kearifan lokal yang secara tekstual melemahkan spirit kemajuan, maka menjadi sangat penting juga untuk membangun pandangan reinterpetatif atas kearifan lokal tersebut, sekalipun masih melekat dalam banyak pemahaman masyarakat bahkan kaum birokrasi, pandangan objektif terhadap budaya (Mulyana,2004), tetapi amat memungkinkan reinterpetasi akan mampu menghadirkan wacana yang bersifat kontekstual dan lebih memberdayakan karakter bangsa.

Hasil reinterpetasi yang telah dikemas secara baik, kemudian dapat menjadi materi-materi praksis pendidikan karakter yang terus-menerus dikampanyekan, diinternalisasikan dan diawasi pelaksanaannya secara menyeluruh, menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas pemerintah sebagai penjamin kesejahteraan warga negaranya.

Bila demikian tentu saja akan segera menyusul tegaknya lembaga-lembaga pemerintah yang melekat padanya citra-citra positif yang pasti akan menjadi kebanggaan, kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya.

Sekali lagi, dengan sepenuh keyakinan, bila Kearifan lokal yang telah teruji didayagunakan dengan tepat yang didukung ilmu dan teknologi, maka akan mampu mendorong lembaga pemerintah untuk dapat melayani masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan yang dicita-citakan oleh setiap bangsa, dalam bingkai masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat yang berkeadaban, masyarakat yang mulia baik di tataran nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Arief (2000), Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, Gramedia.

Hardiman, F. Budi (1993), Menuju Masyarakat Komunikatif, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

Lubis, Mochtar (2001), Manusia Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Mulyana, Deddy (2004), Komunikasi Populer, Bandung, Pustaka Bani Quraisy.

Naina, Akhmadsyah, dkk (2008), Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia. Jakarta, Kompas.

Sugiharto, I. Bambang (1996), Postmodernisme. Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

www.josephineinstitute

www.valuebasedmanagement.net

Tia Muthiah Umar

Menyelesaikan S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba Jurusan Ilmu Jurnalistik (1995). Menyelesaikan S2 di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Bidang Kajian Ilmu Antropologi dan Sosiologi (2004). Pernah mengikuti Program Training di Departemen Pendidikan Australia pada bulan Mei 2011 atas sponsor dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Aktivitas sehari-hari selain sebagai staf pengajar di Fikom Unisba, juga sebagai Penggiat Pendidikan Islam, Sosial, Agama dan Perempuan dalam Organisasi Aisyiyah.

Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung

HP : 081809141745

E-mail: muthiahumar@yahoo.com